

BAB II

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)¹

1. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan, yaitu Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri seperti Yogyakarta ini, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di zaman kemerdekaan disebut Daerah Swapraja.

Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat berdiri sejak tahun 1756, didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman berdiri sejak tahun 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri

¹ <http://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=8>

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Kemudian Negara RI mengeluarkan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan), kemudian UU Nomor 18 Tahun 1964. Kesemuanya mengatur perihal pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom. Terakhir UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, di samping mengatur Pemerintahan Daerah Otonom, sekaligus mengatur Pemerintahan Administratif. Sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk secara tersendiri dengan UU Nomor 3 Tahun 1950 Jo Nomor 19 Tahun 1950 yang sampai saat ini masih berlaku. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi bekas Daerah Kasultanan dan Daerah Pakualaman.

Sesudah Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat pada tanggal 3 Oktober 1988, Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sehari-hari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 340 Tahun 1988, beliau diangkat sebagai Penjabat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Puro Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX

sekaligus sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya memainkan peran yang sangat menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat heterogen.

2. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis

Secara geografis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di tengah Pulau Jawa bagian selatan. Bentuk wilayahnya menyerupai bangun segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara dengan ketinggian 2.911 m di atas permukaan air laut, sedangkan pada bagian kaki, dua buah dataran membentang ke arah selatan membentuk dataran pantai yang memanjang di tepian Samudera Indonesia. Secara astronomis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7.33° - 8.12° Lintang Selatan dan 110° - 110.50° Bujur Timur.

b. Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri.
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km² atau 0,17 dari luas wilayah Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan secara administratif meliputi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

- Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km²
- Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km²
- Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km²
- Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km²
- Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km².

3. Perekonomian

a. Penanaman Modal dan Industri

Penanaman Modal di DIY dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Capaian investasi total pada tahun 2010 mencapai Rp 4.580.972.827.244,00 dengan rincian PMDN sebesar Rp 1.884.925.869.797,00 dan PMA sebesar 2.696.046.957.447,00. Unit usaha di DIY di tahun 2010 ada sekitar 78.122 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 292.625 orang dan nilai investasi sebesar Rp. 878.063.496.000,00.

b. Perdagangan dan UKM

Varian produk ekspor DIY andalan meliputi produk olahan kulit, tekstil dan kayu. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk

yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Namun demikian, secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni dan kreatif tinggi yang padat karya (*labor intensive*). Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Pada 2010 tercatat koperasi aktif sebanyak 1.926 koperasi dan UKM tercatat 13.998 unit usaha.

c. Pertanian dan Kehutanan

Tingkat kesejahteraan petani dalam bidang pertanian di Provinsi DIY yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) NTP dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah. Pada 2010 NTP sebesar 112,74%. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Secara umum ketersediaan pangan di Provinsi DIY cukup karena berkaitan dengan musim panen sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan ikan di DIY dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk perikanan tangkap dilakukan melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Glagah. Produksi

perikanan budidaya tahun 2010 mencapai 39.032 ton dan perikanan tangkap mencapai 4.906 ton, dengan konsumsi ikan sebesar 22,06 kg/kap/tahun.

Hutan di Provinsi DIY didominasi oleh hutan produksi, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Persentase luas hutan di DIY pada tahun 2010 sebesar 5,87% dengan rehabilitasi lahan kritis sebesar 9,93% dan kerusakan kawasan hutan sebesar 4,94%. Sektor perkebunan, dari segi produksi tanaman perkebunan yang potensial di DIY adalah kelapa dan tebu. Kegiatan perkebunan diprioritaskan dalam rangka pengutuhan tanaman memenuhi skala ekonomi serta peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman untuk meningkatkan pendapatan petani.

d. ESDM

Sumber daya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah Bahan Galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, *kalsit*, *kaolin*, dan *zeolin* serta *breksi* batu apung. Selain bahan galian Golongan C tersebut, terdapat bahan galian Golongan A yang berupa Batu Bara. Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba), dan Emas (Au) yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak dan gas di Provinsi DIY dipasok oleh PT PLN dan PT Pertamina.

e. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pada 2010 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 1.456.980 orang, dengan rincian 152.843 dari mancanegara dan 1.304.137 orang dari nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran.

Tercatat ada 37 hotel berbintang dan 1.011 hotel melati di seluruh DIY pada 2010. Adapun penyelenggaraan MICE sebanyak 4.509 kali per tahun atau sekitar 12 kali per hari. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreatifitas seni dan keramahmatan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Pada tahun 2010 terdapat 91 desa wisata dengan 51 diantaranya yang layak dikunjungi. Tiga desa wisata di Kabupaten Sleman hancur terkena erupsi Gunung Merapi sedang 14 lainnya rusak ringan.

Secara geografis, DIY juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa; perdagangan, hotel dan restoran; serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata memberi

efek pengganda (*multiplier effect*) yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan.

4. Sosial Budaya

a. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan penduduk di DIY antara 2003-2007 sebanyak 135.915 jiwa atau kenaikan rata-rata pertahun sebesar 1,1%. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di DIY menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 72,4 tahun pada tahun 2002 menjadi 72,9 tahun pada tahun 2005. Ditinjau dari sisi distribusi penduduk menurut usia, terlihat kecenderungan yang semakin meningkat pada penduduk usia di atas 60 tahun.

Proporsi distribusi penduduk berdasarkan usia produktif memiliki akibat pada sektor tenaga kerja. Angkatan kerja di DIY pada 2010 sebesar 71,41%. Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah kependudukan dan ketenagakerjaan adalah dengan mengadakan program transmigrasi. Pelaksanaan pemberangkatan transmigran asal DIY sampai pada tahun 2008 melalui program transmigrasi sejumlah 76.495 Kk atau 274.926 Jiwa. Ditinjau dari pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, melalui Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Untuk penyebarannya sudah mencakup hampir seluruh Provinsi. Rasio jumlah transmigran swakarsa mandiri pada 2010 mencapai 20% dari total transmigran yang diberangkatkan.

b. Kesejahteraan dan Kesehatan

Sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan, pembangunan kesehatan menjadi salah satu instrumen di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2007 jumlah keluarga miskin sebanyak 275.110 RTM dan menerima bantuan raskin dari pemerintah pusat (meningkat 27 persen dibanding periode tahun 2006 sebanyak 216.536 RTM). Penduduk DIY menurut tahapan kesejahteraan tercatat bahwa pada tahun 2007 kelompok pra sejahtera 21,12%; Sejahtera I 22,70%; Sejahtera II 23,69%; Sejahtera III 26,83%; dan Sejahtera III plus 5,66%. Tingkat kesejahteraan pada tahun 2010 meningkat dengan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 16,83%.

Arah pembangunan kesehatan di DIY secara umum adalah untuk mewujudkan Provinsi DIY yang memiliki status kesehatan masyarakat yang tinggi tidak hanya dalam batas nasional tetapi memiliki kesetaraan di tataran internasional khususnya Asia Tenggara dengan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadikan DIY sebagai pusat mutu dalam pelayanan kesehatan, pendidikan pelatihan kesehatan serta konsultasi kesehatan. Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional Tahun 2010 menempatkan DIY sebagai provinsi dengan indikator kesehatan terbaik dan paling siap dalam mencapai MDG's.

Pada tahun 2010 capaian indikator kesehatan untuk umur harapan hidup berada pada level usia 74,20 tahun. Angka kematian balita sebesar 18/1000 KH, angka kematian bayi sebesar 17/1000 KH, dan angka kematian ibu melahirkan sebesar 103/100.000 KH. Prevalensi gizi buruk sebesar 0.70%, Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 16% sedangkan Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit sebesar 1,32%.

Dari 118 Puskesmas, 20% puskesmas telah menerapkan sistem manajemen mutu melalui pendekatan ISO 9001:200; 7% rumah sakit telah menerapkan ISO 9001:200; 25% rumah sakit di DIY telah terakreditasi dengan 5 standar; 17% RS terakreditasi dengan 12 standar; dan 5% RS telah terakreditasi dengan 16 standar pelayanan. Sarana pelayanan kesehatan yang memiliki unit pelayanan gawat darurat

meningkat menjadi 40% dan RS dengan pelayanan kesehatan jiwa meningkat menjadi 9%. Meskipun demikian cakupan rawat jalan tahun 2006 baru mencapai 10% (nasional 15%) sementara untuk rawat inap 1,2% (nasional 1,5%). Rasio pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mencapai 100%. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk menunjukkan tren meningkat sebesar 39,64 pada tahun 2006. Adapun program jamkesos tahun 2010 dianggarkan Rp. 34.978.592.000,00.

c. Pendidikan

Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai Sekolah Menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok desa. Jumlah SD/MI yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2008 adalah sejumlah 2.035, SMP/MTs/SMP Terbuka sejumlah 529, dan SMA/MA/SMK sejumlah 381 sekolah negeri maupun swasta. Ketersediaan ruang belajar dapat dikatakan sudah memadai dengan rasio siswa per kelas untuk SD/MI : 22, SMP/MTs : 33, SMA/MA/SMK : 31. Sedangkan tingkat ketersediaan guru di Provinsi DIY juga cukup memadai dengan rasio siswa per guru untuk SD/MI: 13, SMP/MTs: 11, SMA/MA/SMK: 9. Untuk tahun 2010 pembinaan guru jenjang SD/MI sebanyak 3.900 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 24.093 guru. Jenjang SMP/MTs sebanyak 3.939 guru telah memenuhi kualifikasi dari

total 12.971 guru. Dan untuk SMA/MA sebanyak 4.826 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 15.067 guru.

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTs, sejalan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2010, angka kelulusan SD/MI mencapai 96,47%, SMP/MTs mencapai 81,84% dan SMA/MA/SMK sebesar 88,98%. Sedangkan angka putus sekolah di tahun yang sama sebesar 0,07% untuk SD/MI; 0,17% untuk SMP/MTs; dan 0,44% untuk SMA/MA/SMK. Sementara itu jumlah perguruan tinggi di Provinsi DIY baik negeri, swasta maupun kedinasan seluruhnya sebanyak 136 institusi dengan rincian 21 universitas, 5 institut, 41 sekolah tinggi, 8 politeknik dan 61 akademi yang diasuh oleh 9.736 dosen.

d. Kebudayaan

DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang *tangible* (fisik) maupun yang *intangible* (non fisik). Potensi budaya yang *tangible* antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya sedangkan potensi budaya yang *intangible* seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat.

DIY memiliki tidak kurang dari 515 Bangunan Cagar Budaya yang tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan

Kraton sebagai institusi warisan adi luhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya dan beradat tradisi. Selain itu, Provinsi DIY juga mempunyai 30 museum, yang dua diantaranya yaitu museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Pada 2010, persentase benda cagar budaya tidak bergerak dalam kategori baik sebesar 41,55%, sedangkan kunjungan ke museum mencapai 6,42%

e. Keagamaan

Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng. Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak 260, dengan 260 kyai dan 2.694 ustadz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah, 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah.

B. Gambaran Umum Bappeda DIY²

1. Sejarah Berdirinya Bappeda

Sesuai Keputusan Presiden RI No: 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Untuk mencapai itu semua dibentuklah suatu badan yang membantu pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Badan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Di dalam Kedudukannya Sebagai Pembantu pemerintah daerah Bappeda sendiri terdiri dari dua tingkat, yaitu Bappeda Tingkat I yang berkedudukan di Propinsi Daerah Tingkat I, dan Bappeda Tingkat II yang berkedudukan di Kabupaten / Kodya Daerah Tingkat II.

² <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/>

Untuk lebih jelasnya berikut rincian kedudukan, fungsi dan tugas Bappeda menurut tingkatannya dalam pemerintahan daerah:

- a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I adalah staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda Tingkat I dipimpin oleh seorang Kepala.
- b). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II adalah staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Bappeda DIY

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Berdiri di atas tanah seluas 1155 m² yang terdiri dari 2 bangunan utama yang letaknya bersebelahan dengan bangunan gedung pertemuan seluas 225 m² (bertingkat), 9 kantor seluas 900 m² (bertingkat). Selebihnya adalah bangunan-bangunan lain yang menunjang kelancaran proses pekerjaan kantor, seperti lapangan parkir, kantin, toilet, dan ruang-ruang pertemuan. Adapun dasar hukum pembentukan Bappeda DIY sebagai berikut:

Tabel 2.1
Dasar Hukum Pembentukan Bappeda DIY

No.	Keppres/Kepmendagri/ Perda/SK Gubernur	Perihal
1	Keppres RI No. 27 Tahun 1980	Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Kepmendagri No. 185 Tahun 1980	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk.I dan Tk.II
3	Perda Propinsi DIY No. 1 Tahun 1982	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY
4	Perda Propinsi DIY No. 4 Tahun 2001	Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY
5	SK Gubernur DIY No. 93 Tahun 2001	Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Propinsi DIY
6	Perda Propinsi DIY No. 2 Tahun 2004	Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY
7	SK Gubernur DIY No. 81 Tahun 2004	Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Propinsi DIY
8	Perda Propinsi DIY No. 7 Tahun 2008	Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY
9	Peraturan Gubernur DIY No. 52 Tahun 2008	Rincian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi DIY

Sumber : Data dokumentasi Bappeda DIY

3. Makna dan Lambang Bappeda DIY



Lambang yang ada di organisasi Bappeda DIY merupakan lambang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut *golong-gilig*. Lambang ini berbentuk bulat (*golong*) dan silinder (*gilig*) yang terdiri dari lukisan bintang, padi dan kapas, tugu bersayap, lingkaran merah yang mengelilingi lingkaran putih, dan ompak bertatakan teratai.

Gambar bintang pada lambang ini memiliki makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan. Tugu bersayap sebagai simbol perikemanusiaan, sayap bagian dalam berjumlah 9 tertuju pada Hamengkubuwono IX dan bagian luar berjumlah 8 tertuju pada Paku Alam VII memiliki makna kepemimpinan. Lingkaran merah putih untuk simbol kebangsaan. Umpak dengan lapik tatakan bunga teratai sebagai simbol kerakyatan.

4. Visi dan Misi Bappeda DIY Tahun 2009-2013

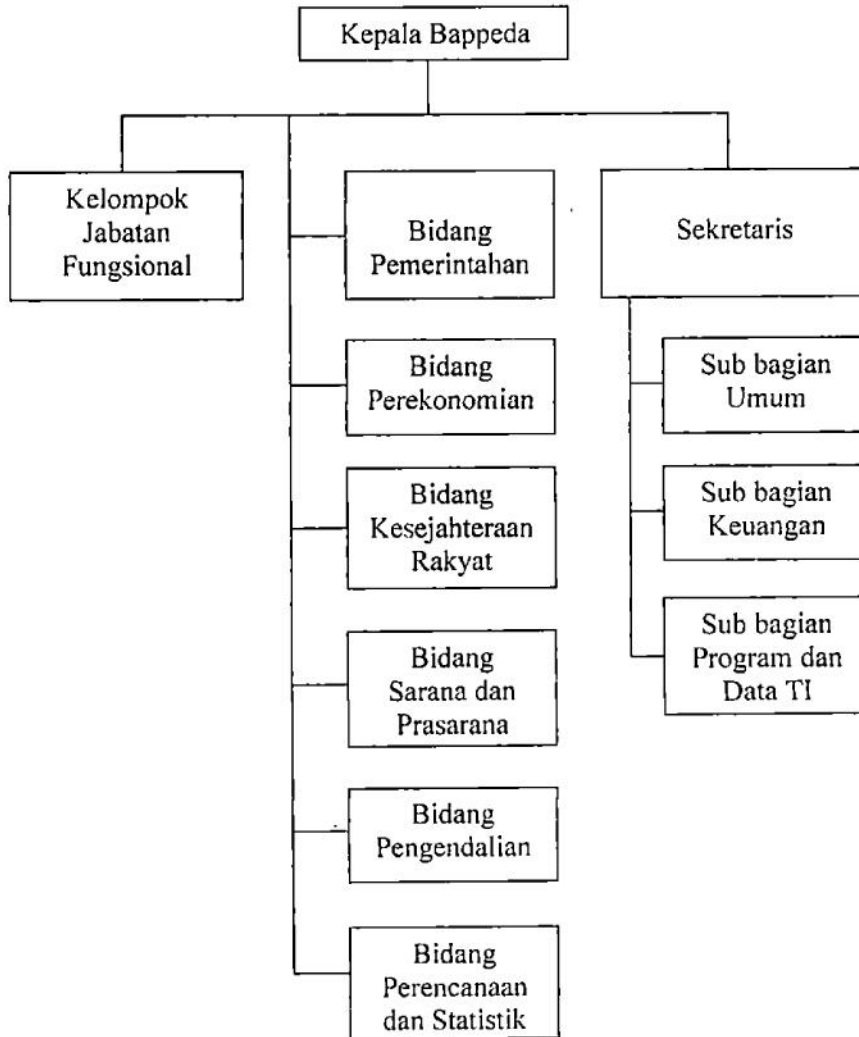
- Visi

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan terintegrasi.

- Misi

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan pembangunan.
- Meningkatkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Struktur Organisasi Bappeda DIY



6. Susunan Kepegawaian

Untuk menjalankan tugasnya, Bappeda Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta saat ini didukung oleh sejumlah pegawai, berdasarkan:

1). Jabatan

a. Pejabat Struktural

- Kepala (eselon II A) : 1 orang
- Sekretaris (eselon III A) : 1 orang
- Kepala Bidang (eselon III A) : 6 orang
- Kepala Sub Bagian (eselon IV A) : 3 orang
- Kepala Sub Bidang (eselon IV A) : 12 orang

b. Pejabat Fungsional : 2 orang

2). Golongan

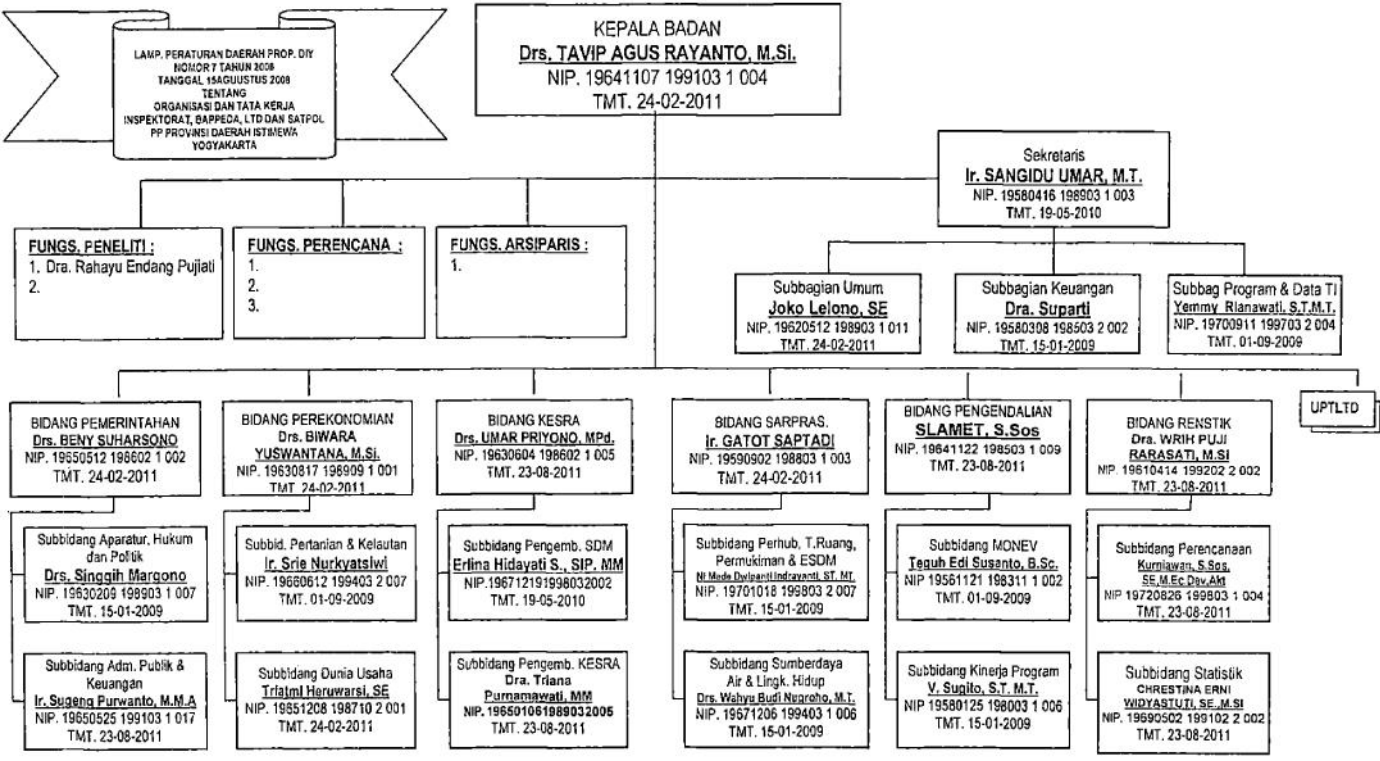
- Golongan IV : 13 orang
- Golongan III : 87 orang
- Golongan II : 14 orang
- Golongan I : - orang

3). Pendidikan

- Strata 2 (S-2) : 20 orang
- Strata 1 (S-1) : 45 orang
- D.IV : 3 orang
- D III/Sarjana Muda : 10 orang
- SLTA : 27 orang
- SLTP : 1 orang

**BADAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DIBUATKAN DI BUREAU BAPPEDA 2011



7. Tugas dan Fungsi Bappeda DIY

- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

- Fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- 2). Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4). Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di daerah;
- 5). Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- 6). Penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 7). Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Tugas dan Fungsi Sekretariat Bappeda DIY

-Tugas : melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan data dan sistem informasi.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Sekretariat;
- 2). Penyusunan program Badan;
- 3). Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

- 4). Penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- 5). Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- 6). Pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- 7). Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- 8). Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- 9). Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- 10). Evaluasi dan penyusunan laporan program Badan;
- 11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi

- Tugas :

Subbagian program, data, dan teknologi informasi mempunyai tugas penyiapan, penyusunan dan evaluasi program, pengelolaan data, serta pengembangan sistem dan teknologi informasi Badan.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi;
- 2). Penyusunan program Badan;
- 3). Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- 4). Penyiapan bahan fasilitas pengembangan kerjasama teknis;

- 5). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 6). Penyusunan laporan Badan;
- 7). Evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

b. Subbagian Keuangan

- Tugas :

Melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Subbagian Keuangan;
- 2). Penyusunan rencana anggaran Badan;
- 3). Pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
- 4). Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 5). Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 6). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 7). Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

c. Subbagian Umum

- Tugas :

Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang, kepegawaian, perpustakaan, kehumasan, dan efisiensi tatalaksana.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Subbagian Umum;
- 2). Pengelolaan kearsipan;
- 3). Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 4). Pengelolaan barang Badan;
- 5). Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 6). Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- 7). Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- 8). Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- 9). Penyelenggaraan kehumasan Badan;
- 10). Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- 11). Evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

9. Bidang-Bidang Di Bappeda DIY

a. Bidang Pemerintahan

- Terdiri dari : a). Subbidang Aparatur, Hukum, dan Politik.

b). Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan.

- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Bidang Pemerintahan;
- 2). Penyiapan program di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;

- 3). Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
- 4). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, hukum, dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
- 5). Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- 6). Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pemerintahan;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perekonomian

- Terdiri dari : a). Subbidang Pertanian dan Kelautan.

b). Subbidang Dunia Usaha.

- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Bidang Perekonomian;
- 2). Penyiapan program di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi, UKM serta pariwisata;

- 3). Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi, UKM serta pariwisata;
- 4). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi, UKM serta pariwisata;
- 5). Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- 6). Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perekonomian;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Terdiri dari : a). Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b). Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.
- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan.
- Fungsi :
 - 1). Penyusunan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 2). Penyiapan program di bidang pendidikan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;

- 3). Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;
- 4). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;
- 5). Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- 6). Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana

- Terdiri dari : a). Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan Sumberdaya Mineral.
b). Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup.
- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup.
- Fungsi :
 - 1). Penyusunan program Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2). Penyiapan program di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;

- 3). Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- 4). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- 5). Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- 6). Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sarana dan Prasarana;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pengendalian

- Terdiri dari : a). Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
b). Subbidang Kinerja Program.
- Tugas : melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- Fungsi :
 - 1). Penyusunan program Bidang Pengendalian;
 - 2). Pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - 3). Pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

- 4). Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 5). Penyiapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 6). Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan daerah;
- 7). Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian;
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perencanaan dan Statistik

- Terdiri dari : a). Subbidang Perencanaan.

b). Subbidang Statistik.

- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan statistik daerah.

- Fungsi :

- 1). Penyusunan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
- 2). Penyiapan program pembangunan daerah;
- 3). Penyelenggaraan, pengawasan, pemberian dukungan dan pengembangan di bidang statistik;
- 4). Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
- 5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.